
DAFTAR ISI

Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

1. Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia
Nanang Indra Kurniawan 1-15
2. Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
Tenti Kurniawati 16-25
3. Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara:
Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)
Hafid Rahardjo 26-44
4. Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia:
Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998
Ahmad Rizky Mardhatillah Umar 45-61
5. Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi
di Kabupaten Kulon Progo
Eka Zuni Lusi Astuti 62-74
6. Pembangunan Berbasis *Waterfront* dan Transformasi Konflik di
Bantaran Sungai: *Sebuah Pemikiran Awal*
Cahyo Seftyono 75-83
7. Does the Pressure of Population and Poverty cause Deforestation?
Pungky Widiaryanto 84-93

Pembangunan berbasis *Waterfront* dan Transformasi Konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal

Cahyo Seftyono

Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudharto SH, Tembalang, Semarang
e-mail: cahyo.seftyono@undip.ac.id

Abstract

Water resources development at this time led to the front view policy known as waterfront term. This policy is to make water resources as the main area for regional development. The concept of 'front view' was developed originally to give understanding to people of the water resources as not only functional but also interesting to look at. On the other side, front view-based development has become the means of developing active interaction among people around the site.

With regard to the construction of waterfront along the river, the social interaction of community members has become more meaningful, because apparently this is the cause of the unity of the community in the development of their area. As the most communities along the river are lower middle class people who are prone to conflict, this idea of front view-based river bank construction has united the people on one side of the river with another.

Key Words:

Waterfront, River bank, conflict transformation

Abstrak

Pembangunan sumber daya air saat ini mengarah kepada kebijakan 'front view', yang dikenal dengan istilah *waterfront*. Kebijakan ini berarti menjadikan sumber daya air sebagai wilayah depan bagi pembangunan kawasan. Konsep 'front view' ini dikembangkan awalnya dengan tujuan agar masyarakat atau manusia dapat melihat fungsi sumber daya air sebagai sesuatu yang selain bermanfaat, tetapi juga menarik dipandang. Pembangunan berbasis 'front view' ini ternyata di sisi lain menjadi salah satu jalan untuk membangun interaksi aktif di dalam masyarakat yang berada di sekeliling atau sekitar sumber daya air.

Berkenaan dengan pembangunan *waterfront* di bantaran sungai, proses interaksi sosial anggota masyarakat menjadi lebih bermakna, dikarenakan ternyata hal ini menjadi penyebab persatuan masyarakat dalam rangka pembangunan wilayah bersama. Sebagaimana kebanyakan masyarakat di bantaran sungai adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang cenderung rawan konflik, dengan adanya ide pembangunan bantaran sungai berbasis 'front view', maka masing-masing anggota masyarakat menjadi sadar bahwa mereka memiliki sungai yang menyatukan antara satu kelompok masyarakat di satu seberang sungai, dengan satu kelompok masyarakat di seberang sungai yang lain.

Kata kunci:

Waterfront, Pembangunan Bantaran Sungai, Transformasi konflik

Pendahuluan

Masalah sosial yang saat ini dihadapi oleh manusia secara umum meliputi berbagai permasalahan yang dimunculkan akibat alam, dan juga yang tidak kalah dominannya adalah permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Kita saat ini hampir tidak dapat menghindari berita-berita terkait dengan isu-isu kekerasan, anak-anak yang kekurangan gizi serta kemiskinan yang tumbuh menjamur di sudut-sudut kota besar, minimnya pekerjaan dan peningkatan aksi kejahatan, penyakit yang muncul akibat bencana dan juga beragam permasalahan yang didasarkan pada isu-isu alam lainnya, seperti kepemilikan 'sumber daya alam' (Sampson, 1999). Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, maka individu, komunitas dan negara memiliki kepentingan sendiri maupun bersama-sama dalam upaya membangkitkan rasa kepemilikan, yang berujung pada konflik maupun integrasi sosial.

Pertanyaan mendasar dari konflik maupun integrasi sosial yang berbasis pada lingkungan (sosial) adalah bagaimana lingkungan (sosial) dapat mengubah nalar konflik menjadi nalar integrasi, dalam hal ini terjadi transformasi konflik di masyarakat? Hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan tidak dilihat sebagai aspek fisik semata, melainkan juga dilihat sebagai bagian dari area dimana interaksi sosial terjadi (Hess, 1999). Interaksi sosial yang ada di masyarakat memungkinkan permasalahan-permasalahan yang dialami secara individu maupun kelompok terakumulasi sebagai permasalahan bersama di dalam sebuah komunitas, sehingga memunculkan sumber konflik di dalam skala yang lebih besar.

Salah satu tempat bertemunya masyarakat dalam ruang konflik maupun integrasi sosial adalah sumber daya air.

Dalam hal ini masyarakat dengan kehidupan di sekeliling sumber daya air mengharuskan mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Didasarkan pada kepentingan masing-masing, maka kemungkinan memunculkan konflik horisontal sangatlah tinggi, namun demikian ketiak mereka disatukan oleh agenda tertentu, maka konflik tersebut dapat berubah menjadi kebersamaan dalam berbagai sistem, struktur dan aktivitas sosial. Hal ini sebagaimana yang dapat kita lihat dari berbagai sumber daya air yang ketika dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah mereka, maka akan muncul kepentingan bersama untuk membangun wilayah tersebut. Sebagaimana yang ingin dicapai dari berbagai gagasan pembangunan berbasis waterfront.

Literature Review: Waterfront dan Transformasi Konflik

Pembangunan berbasis waterfront

Gagasan awal dari konsep *waterfront* adalah pembangunan sumber daya air, sebagai bagian dari interaksi lingkungan dengan pembangunan perkotaan. Pembangunan tepian sumber daya air ini menjadi penting untuk mendapat perhatian dikarenakan bagian inilah yang pertama kali mengintegrasikan sumber daya air dengan aspek-aspek fisik lainnya. Seperti pantai, antara daratan dengan lautan dan udara (langit); sungai, antara daratan dengan perairan sungai itu sendiri (Wrenn, 1983). Selain itu, menurut Zhang (2002) pantai dan tepi sungai adalah fitur air yang paling menarik bagi pemukiman manusia, bahkan di sebagian besar negara, tanah di depan air dikembangkan lebih awal dari daerah pedalaman. Hal ini juga diakibatkan adanya perbedaan pola pikir pembangunan yang dianut. Ada kalanya pembangunan diutamakan pada wilayah-wilayah yang dianggap sebagai episentrum pembangunan seperti pusat kota, ada kalanya yang

lain pembangunan justru diprioritaskan pada wilayah yang dianggap sebagai pertemuan awal antara satu teritori dengan teritori yang lain. Hal ini dilihat sebagai properti yang mudah untuk dilihat (Breen & Rigby, 1994).

Berkenaan dengan pembangunan berbasis waterfront di tepian pantai, di banyak kota di dunia, daerah pantai mulai dijadikan sebagai pusat komersial, transportasi dan pusat-pusat manufaktur, sebagai fokus utama untuk mereka. Namun, karena masalah kompleks dan beragam perubahan teknologi, dan pembaharuan pola pembangunan perkotaan, terjadi perubahan dramatis di daerah tepi laut. Pembangunan tidak lagi membawa dampak positif saja sebagai akibat dari pemasukan ekonomi dan pencitraan suatu wilayah, melainkan di sisi lain terdapat juga dampak negatif yaitu mulai ada *degradasi* nilai lingkungan.

Sedangkan, ketika kita berbicara tentang Indonesia, sejarah perkembangan kawasan *waterfront* di Indonesia pada masa lampau lebih banyak terjadi di kawasan-kawasan tepi pantai (Triyono dan Arief, 2003). Hal ini terlihat pada sejarah kota-kota seperti Jakarta, Semarang, kota-kota di sepanjang Selat Malaka dan beberapa kota lainnya, terutama daerah-daerah dengan tujuan transit pelayaran dalam rangka pembangunan pulau bagian dalam. Pada masa kolonial kota-kota pantai ini menjadi pusat-pusat perdagangan. Dalam perkembangan berikutnya berbagai kebudayaan dari berbagai daerah dan negara bertemu di wilayah tersebut. Pengaruh kebudayaan yang berbeda dari budaya yang ada mengakibatkan terjadinya perubahan sosial masyarakat setempat (Gerlach and Hine, 1971). Perubahan tersebut nampak pada pola kehidupan masyarakat yang semula sebagai nelayan, memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitarnya,

bergeser ke pola kehidupan masyarakat pedagang. Inilah yang kemudian juga menjadi dampak penting dari pembangunan berbasis waterfront, terjadinya perubahan sistem sosial. Dan pertanyaan kemudian adalah apakah pembangunan tersebut juga dapat berpengaruh pada masyarakat di wilayah pulau bagian dalam, seperti pembangunan sungai?

Conflict Transformation

Dalam interaksi sosial yang berbasis pada konflik kita mengenal ada tiga fase perubahan dari konflik menuju integrasi sosial. Mulai dari konflik di dalam masyarakat, resolusi konflik yang cenderung menyelesaikan konflik secara singkat namun tidak mendasar, hingga terjadinya transformasi konflik yang merupakan bentuk paling 'damai' dari sebuah sistem sosial yang berarti konflik di dalam masyarakat sudah berubah menjadi satu sistem dan struktur yang baru. Dalam pandangan Lederach (2003) disebutkan beberapa perubahan yang menjadi bagian penting dari sebuah transformasi konflik, yaitu: individu-individu, hubungan antar individu (atau skala yang lebih besar), struktur, dan budaya. Artinya, perubahan yang paling mendasar dalam sebuah transformasi konflik adalah bentuk dari budaya sebuah masyarakat dari satu bentuk yang konfliktual menjadi integrasi.

Lederach dalam bukunya yang lain (Lederach, 1997) juga menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu dicapai dalam upaya pembentukan masyarakat yang nir-konflik. Selain perubahan-perubahan secara mikro hingga skala makro yang memang harus ada penyesuaian secara sistematis dan bertahap, proses transformasi konflik dapat diwujudkan melalui: peningkatan pemahaman bahwa masyarakat nir-konflik hanya dapat dibangun melalui hubungan dan koordinasi yang saling berkaitan

diantara banyak elemen masyarakat, menumbuhkan pemahaman antara satu entitas dengan entitas yang lain, dan yang terakhir memformalisasi apa yang sudah diupayakan sebagai bagian dari pembentukan masyarakat baru. Bentuk yang demikian, dalam konteks ke-Indonesiaan dapat dilihat seperti pembentukan forum-forum kemasyarakatan yang secara legal formal didukung oleh pemerintah.

Temuan dan Diskusi

Terkait dengan penggunaan sungai, sebagai wujud gagasan *waterfront*, maka dapat dilihat bahwa sungai memiliki nilai sosial sebagai tempat untuk kegiatan bersama yang pada fase tertentu juga memiliki fungsi sebagai alat transformasi konflik.

Sungai dan Kebersamaan Masyarakat

Salah satu fungsi sosial sungai yang cukup dikenal adalah sebagai bagian dari potensi wisata (Prideaux and Cooper, 2009), meskipun memang hal ini belum semenarik ketika kita membahas isu wisata terkait dengan pegunungan atau pantai. Bahkan untuk kondisi Indonesia sendiri, wisata sungai masih belum banyak diminati. Padahal, Indonesia punya beberapa sungai yang bisa diberdayakan untuk meningkatkan pariwisata. Keberadaan sungai di negara tropis seperti Indonesia punya keunikan tersendiri. Sungai dengan air cenderung hangat ini melewati hutan tropis, menjadi ekosistem bagi flora dan fauna khas Negeri Khatulistiwa. Sebut saja Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia yang membelah Kalimantan Barat. Namun sayangnya, sungai di Indonesia belum dioptimalkan sebagai destinasi wisata baik alam maupun olahraga dan petualangan. Disadari atau tidak, sungai memiliki potensi alamiah sebagai tempat wisata. Tidak hanya di wilayah tropis saja sungai menjadi daerah wisata yang sudah dikembangkan di manca negara, tetapi sungai juga menjadi sasaran

pembangunan wisata di beberapa wilayah geografis lainnya (Bruns, Bandaragoda, and Samad, 2001). Untuk kategori Indonesia, dalam situs wisata melayu, di Indonesia setidaknya terdapat lebih dari 20 sungai yang merupakan objek wisata. Mulai dari sungai Kampar di Belawan, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, hingga Sungai Bengawan Solo di Solo.

Kajian mengenai fisik dan ekologi sungai, termasuk di dalamnya tentang aspek kemanusiaan dalam pengelolaan sungai menjadikan sungai sebagai salah satu wilayah yang penting bagi kebutuhan manusia (Prideaux and Cooper, 2009: 4). Sebagaimana dengan masyarakat tradisional yang sangat bergantung kehidupannya pada sumber air, maka sungai dalam hal ini juga menjadi salah satu sumber daya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sungai selain diperuntukkan sebagai kebutuhan individu, juga digunakan sebagai aktivitas bersama seperti tempat perdagangan. Dalam hal ini sungai tersebut menjadi pasar terapung yang menempatkan perahu-perahu kecil pedagang menjadi tempat untuk bertransaksi jual beli kebutuhan sehari-hari. Seperti pertukaran barang, atau dalam konteks yang lebih modern dapat kita temukan misalnya yang terdapat di Sungai Barito-Banjarmasin, dengan adanya perdagangan atau pasar terapung.

Terkait Sungai Barito di Banjarmasin misalnya, budaya sungai ditandai dengan adanya permukiman pinggir sungai, pasar terapung dan jukung, serta interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Permukiman pinggir sungai yang merupakan bagian dari budaya sungai ini adalah permukiman lama yang sebelumnya tumbuh secara spontan di sepanjang sungai dan di pusat kota pada lokasi-lokasi perkampungan lama seperti Kawasan Kuin, Sungai Jindah, Pasar Lama, Antasan, Pekapuran, Teluk Tiram, Teluk Dalam, Belitung, Kampung Melayu, dan

lainnya. Kawasan lama seperti ini dapat dimasukkan kedalam kawasan cagar budaya, seperti bunyi Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pasal 1 ayat 1 dimana disebutkan bahwa benda yang dilindungi berupa cagar budaya adalah benda buatan manusia atau benda alam, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sehingga kawasan ini perlu dipertahankan dan ditata kembali untuk menampilkan kekhasannya sehingga dapat dijadikan sebagai potensi daerah (Goenmiandari, et.al., 2010). Dengan pandangan ini maka dapat dikatakan bahwa pembangunan kawasan bantaran sungai atau dalam skala yang lebih luas sumber daya air, perlu dukungan dari pemerintah dan juga melalui pendekatan-pendekatan sosial-kultural dibandingkan hanya melalui pendekatan kebijakan berorientasi ekonomi. Dan pada proses inilah kemudian keinginan masing-masing anggota masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

Sedangkan sungai-sungai yang memiliki peran dalam transformasi konflik, biasanya merupakan sungai-sungai yang disekitar bantaran diisi oleh pemukiman penduduk. Biasanya pemukiman-pemukiman penduduk di bantaran sungai identik dengan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan pendidikan yang minim serta rawan konflik (Seftyono, 2010). Namun demikian, ternyata karena adanya kesadaran bersama atas fungsi sungai, maka masyarakat menjadi merasa memiliki sungai yang ada di sekeliling mereka. Hingga pada proses tertentu, mereka kemudian lebih berpikir untuk membangun sungai yang mereka jadikan tempat tinggal

dibandingkan dengan berkonflik antar sesama komunitas di bantaran sungai. Hal ini tergambar dari beberapa sungai dengan bantaran padat penduduk seperti di Sungai Code (Kali Code). Dalam terminology modern, kondisi yang membuat masyarakat dapat berbaur, memiliki visi yang sama kedepan, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dapat dikategorisasi sebagai masyarakat yang *sustainable* (Seftyono, 2012). Begitu pula dengan sungai lain di Yogyakarta, yaitu Sungai Winongo. Pembahasan lebih lanjut dari proses transformasi konflik ini secara politik akan dibahas lebih lanjut.

Pembangunan Sungai untuk Transformasi konflik: Analisa Proses Politik

Kehidupan di Indonesia yang kian hari kian rumit, sebagai dampak dari krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan juga krisis Eropa beberapa tahun terakhir menyebabkan perekonomian dalam negeri sedikit banyak terganggu. Akibatnya permasalahan ekonomi menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dari hampir sebagian besar warga Indonesia. Terlebih jika kita berbicara masyarakat kelas bawah, maka dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong besar, meskipun ada tren mengalami penurunan.

Perkembangan angka kemiskinan baik jumlah maupun persentasenya penduduk miskin Indonesia sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2011 telah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 1976, ada 40% atau sekitar 54 Juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Secara nasional penduduk miskin yang masih dibawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2011 adalah 30,02 juta jiwa (12,49%), jika dibandingkan dengan bulan Maret 2010 yaitu 31,02 juta jiwa (13,33%) maka telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara sangat signifikan yaitu sekitar 1 juta jiwa atau telah

terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,84%. Pada periode 2005-2009 angka kemiskinan menurun antara 1.16 sampai 1,27 persen per tahun dan mampu mengentaskan hampir 7 juta jiwa dari kemiskinan selama periode tersebut. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (BPS, 2012).

Jumlah angka kemiskinan yang demikian besar dapat memicu angka kejahatan dan konflik di masyarakat. Lebih jauh, terkait dengan *space* yang mereka butuhkan untuk tinggal, jumlah penduduk dengan ekonomi kelas bawah biasanya memilih lokasi-lokasi dengan minim biaya. Sebagian dari masyarakat yang masuk kategori miskin, memilih tinggal di rumah susun dengan minim fasilitas dan jumlah penghuni di atas standar, tinggal di kolong jembatan, hingga membuat pemukiman non-permanen di bantaran sungai.

Meskipun pemerintah memiliki berbagai program untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan membuat masyarakat memiliki rumah permanen, bukan berarti pembangunan yang sudah berjalan juga berimplikasi pada minimnya kekerasan di masyarakat. Salah satu bentuk konflik sosial yang masih saja terjadi di masyarakat misalnya konflik warga yang tinggal di pemukiman bantaran sungai. Hal ini terjadi akibat ketidaksiapan masyarakat kalangan bawah untuk berpartisipasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain dalam pembangunan yang dijalankan. Atau dalam konteks lain, bisa juga dikatakan pembangunan yang berjalan membutuhkan proses (waktu dan biaya) seringkali justru juga menjadi masalah di masyarakat itu sendiri.

Akibatnya apa yang diupayakan oleh pemerintah seringkali tidak berjalan maksimal. Selalu saja ada resistensi dari kelompok masyarakat tertentu meskipun terkait dengan pembangunan. Dalam kondisi ini, perlu adanya rasa keterlibatan dari masyarakat dalam pembangunan, sehingga mereka dapat memberi masukan kepada pelaksana kebijakan dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan dan bersama-sama menjalankannya.

Rasa keterlibatan dan identifikasi (*sense of belonging and identification*) ditandai dengan rasa percaya bahwa individu akan diterima oleh masyarakat. Rasa keterlibatan seseorang pada masyarakat muncul dari adanya perasaan setara dan berkontribusi dalam keluarga. Kebutuhan untuk keterlibatan sangat diperlukan untuk melakukan kontribusi dalam masyarakat (Ferguson, 2010). Masyarakat merasa bangga dengan keberadaan Kampung Code dengan pernak perniknya di tengah-tengah mereka. Mereka juga memperhatikan perkembangan kampung mereka dan akan melakukan tindakan pelestarian yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Code memiliki *sense of community* yang cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan teori McMillan dan Chavis (1986) bahwa *sense of community* adalah perasaan keterikatan antara anggota masyarakat, kebermaknaan antar anggota dan kepercayaan bahwa masing-masing kebutuhan anggota akan terpenuhi. Aspek terpenting dalam munculnya rasa keterlibatan masyarakat adalah integrasi sosial. Integrasi sosial terjadi apabila seseorang telah menganggap identitasnya pribadi sebagai identitas kelompok sosialnya. Untuk mencapai itu maka perlu adanya kesetaraan individu di dalam kelompok tersebut. Saat seseorang merasa bahwa rasa keterlibatannya rendah maka perilakunya akan diarahkan pada hal yang

mengarah pada perlindungan diri daripada kontribusi pada komunitas, sedangkan bagi seseorang dengan rasa keterlibatan yang tinggi akan lebih berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dibandingkan kesejahteraan pribadi. Kemauan untuk berkontribusi kepada komunitas ini dikarenakan masyarakat sudah merasa menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Ketika pembangunan dijalankan kepada wilayah lain, mereka merasa bahwa nantinya pembangunan itu akan memiliki dampak positif untuk mereka juga.

Salah satu temuan menarik dalam wacana pembangunan berbasis waterfront di Indonesia yang berdampak pada transformasi konflik adalah pembangunan Sungai Code (Kali Code) dan Sungai Winongo (Kali Winongo) di Yogyakarta. Kali Code dan Kali Winongo yang semula merupakan wilayah kotor dan rawan konflik, dengan adanya upaya pembangunan lambat laun menjadi wilayah yang tertata dan minim konflik horisontal. Pembangunan sungai berbasis *waterfront* ini sendiri bermula dari gagasan RM Wijaya yang menggagas Kampung Code yang kemudian di tahun 1990an melalui agenda dari pemerintah Kota Yogyakarta dengan menjadikan sungai sebagai salah satu simbil wisata Kota Yogyakarta. Bahkan, agenda pembangunan wisata sungai di Kota Yogyakarta saat ini tidak hanya difokuskan pada Code dan Winongo, tetapi juga di Gajah Wong.

Bantaran-bantaran sungai yang semula menjadi area paling belakang pembangunan dari sebuah kota, dikarenakan di sanalah kumpulan masyarakat kelas bawah bermukim, seiring dengan berjalannya waktu mulai dijadikan fokus pembangunan oleh pemerintah kota. Dengan adanya ide pembangunan dan juga pembentuk forum-forum kemasyarakatan di sekitar bantaran sungai, maka konflik-konflik masyarakat yang terjadi di tahun 1980-

1990an menjadi terhapus secara perlahan dan menjadikan pembangunan sungai sebagai ruang dialog forum-forum kemasyarakatan.

Forum-forum kemasyarakatan ini juga menjawab kegagalan pemerintah selama ini dalam pembangunan wilayah sungai yang cenderung *top-down*. Kelemahan dari partisipasi yang hanya diarahkan pada penerapan kebijaksanaan (pola *top-down*), adalah bahwa ia tidak bisa menumbuhkan “rasa ikut memiliki” di kalangan masyarakat terhadap program pembangunan itu. Tanpa adanya rasa ikut memiliki, anggota masyarakat tidak akan merasa tergugah untuk ikut serta dalam pembangunan itu. Kalau secara formal mereka “mendukung” program pembangunan karena adanya instruksi pemerintah, maka yang terjadi bukanlah partisipasi dengan dorongan sifat keaktifan pribadi, tetapi mobilisasi dengan sifat keterpaksaan atau dorongan dari luar dirinya (Seftyono et.al., 2012). Dan dengan adanya partisipasi aktif dalam forum-forum kemasyarakatan, maka pikiran-pikiran konflik yang selama ini ada, oleh masyarakat diubah menjadi pikiran untuk memberdayakan diri dalam rangka membantu program pemerintah dalam pembangunan sungai. Inilah bentuk transformasi sosial yang terbangun di masyarakat.

Kesimpulan

Instrumen, struktur, relasi, dan aspek budaya dari lingkungan sosial tidak dapat disangkal lagi adalah sebuah hubungan yang saling terkait secara aktif. Pada masing-masing tahapan dan wilayah, kesemuanya memiliki pengaruh dalam pembentukan pola kehidupan di dalam masyarakat. Sebagaimana di sebuah masyarakat atau komunitas pemukiman penduduk di bantaran sungai, instrument ketersediaan ruang tempat tinggal, struktur sosial masyarakat, dan juga aspek budaya yang

mereka bawa dari tempat asal membangun sebuah lingkungan sosial yang rentan konflik. Sumber utamanya jelas: masyarakat yang kekurangan kebutuhan dasar.

Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menjadi salah satu sebab mengapa interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat cenderung mengarah kepada konflik. Ketika masing-masing individu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri-sendiri maka di saat yang sama mereka menegaskan kebutuhan kelompok yang lebih besar. Akibatnya konflik horizontal tidak dapat dielakkan.

Pembangunan bantaran sungai dengan basis *waterfront*, memungkinkan masyarakat berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Terlebih dengan arah pembangunan yang lebih jelas, seperti aspek ekonomi wisata dan kemudahan akses sumber air bersih menyebabkan mereka kemudian dapat bekerja sama untuk pembangunan bantaran sungai tersebut. Hal inilah yang juga terjadi di beberapa sungai di Indonesia (khususnya dalam kajian penulis selama ini di Yogyakarta). Wilayah bantaran sungai yang semula menjadi arena konflik masyarakat, dengan adanya pembangunan berbasis *waterfront*, maka mereka menjadi terkoneksi melalui forum-forum kemasyarakatan yang mampu memaksimalkan kegiatan positif bersama dan meminimalisasi konflik.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik. (2012). *Buku Statistik Tahunan*. Jakarta: BPS.
- Breen, A. and Rigby, D. (1996). *The New Waterfront: A Worldwide Urban Success Story*. New York: McGraw-Hill.
- Bruns, Bryan, D. J. Bandaragoda, and M. Samad (2001) (ed.). *Integrated Water-Resources Management in a River-Basin Context: Institutional: Strategies for Improving the Productivity of Agricultural Water Management*. Proceedings of the Regional Workshop. Malang, Indonesia, January 2001.
- Ferguson, E. (2010). Adier's Innovative Contributions Regarding the Need to Belong. *Journal of Individual Psychology*. Vol. 66 No 1.
- Gerlach, Luther P. and Virginia H. Hine. (1971). *People, Power, Change: Movements of Social Transformation*. New York: Bobbs-Merrill.
- Goenmiandari, Betty, Johan Silas, dan Rimadewi Supriharjo. (2010). *Konsep Penataan Pemukiman bantaran Sungai di Kota Banjarmasin berdasarkan Budaya Setempat*. Seminar Nasional Perumahan Pemukiman dan Pembangunan Kota. Jurusan Arsitektur ITS Maret 2010.
- Hess, B. B. (1999). *Breaking and Entering Establishment: Committing Social Change and Confronting the Backlash*. Social Problems. Vol. 46.
- Lederach, J. P. (1997). *Justpeace – the Challenge of the 21st Century*, In European Centre for Conflict Prevention. *People Building Peace: 35 Inspiring Stories from around the World*. Utrecht: European Centre for Conflict Prevention.
- (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. Intercourse, PA: Good Books.
- McMillan, D.W., & Chavis, D.M. (1986). Sense of community: A definition and theory. *Journal of Community Psychology*. Vol.14 No.1.
- Prideaux, Bruce and Malcolm Cooper. (2009) (ed.). *River Tourism*. Cambridge, Oxford: MPG Books Group.
- Seftyono, Cahyo. (2010). *Local Community in Valuing Ecosystem Services: Warga*

- Kampung Code's Perspective on Kali Code Existence*. Proceeding 1st Annual Indonesian Scholars Conference in Taiwan pp.231-235. doi:10.2139/ssrn.1763226.
- (2012). *Kali Code: From Merapi to Sustainable Society*. Proceeding International Conference on Sustainable Innovation 2012/ 3rd International Joint Seminar UMY – IIUM – TU Eindhoven ISBN 978-602-7577-02-2 doi:10.2139/ssrn.2020132.
- , Veri Julianto, dan Dian Festianto. (2012). Pengetahuan Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Interaksi Sosial Politik Warga Kampung Code, Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Swara Politika*. Vol. 12 No. 3.
- Triyono dan Ahmad Arief. (2003). *Modal Sosial Sebagai Mainstream Pengembangan Masyarakat Pesisir: Sebuah Pendekatan Sosial untuk Mendukung Pembangunan Lokal Tipologi Masyarakat Pesisir*. Prosiding Lokakarya Nasional 'Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem untuk Mereduksi Potensi Konflik Antar Daerah. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Agustus 2003.
- Wrenn, D.M. (1983). *Urban Waterfront Development*, Washington DC: The Urban Land Institute.
- Zhang, L. (2002). *An Evaluation an Urban Riverfront Park, Spokane, Washington- Experience and Lessons for Designer*. Tesis tidak diterbitkan. Washington State University, United States.